



# **SOSIALISASI TIM AD HOC KEPADA CALON ANGGOTA DEWAN ASESOR**

## **PENGUKURAN INDEKS KEINSINYURAN PII UNTUK PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

Oleh: 1. Ir. Handoko, M.T., IPM, APEC Eng., ASEAN Eng.  
2. Ir. M. Yanuar J. Purwanto, Ph.D., IPU, ASEAN Eng.



**Daring, 7 Februari 2026**



# DAFTAR ISI

1. Susunan Tim Pelaksana Penyusun Pedoman Kerja dan Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII
2. Latar Belakang dan Konsep Indeks Keinsinyuran
  - a. Latar Belakang dan Tujuan Indeks Keinsinyuran PII
  - b. Definisi dan Konsep Indeks Keinsinyuran PII
  - c. Metodologi Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII
3. Hasil dan Manfaat
  - a. Hasil Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII
  - b. Penghargaan Keinsinyuran PII
  - c. Manfaat Penghargaan Keinsinyuran PII
4. Metode dan Organisasi Pelaksanaan
  - a. Metode Pelaksanaan
  - b. Organisasi Pelaksanaan
5. Peran PII
6. Kesimpulan

# **1. SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUN PEDOMAN KERJA DAN PENGUKURAN INDEKS KEINSINYURAN PII (SK PP PII Nomor: 004/KPP-PII/I/2026)**

**Pengarah** : Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie, MBA, IPU

**Penasehat** : Prof. Dr. Suhono Harso Supangkat, M.Eng.  
Dr. Ir. Yono Reksoprodjo, DIC.  
Dr. Ir. Teguh Haryono, MBA, IPU, ASEAN Eng., ACPE, APEC Eng.

**Pelaksana**

**Ketua** : Ir. Handoko, M.T., IPM, APEC Eng., ASEAN Eng.

**Wakil Ketua** : Ir. M. Yanuar J. Purwanto, Ph.D., IPU, ASEAN Eng.

**Sekretaris** : Ir. Sri Hidayati AKP, S.T., M.Sc.(PM), IPU, APEC Eng., ASEAN Eng.

**Wakil Sekretaris:** Riris Hutagaol, S.T., M.T.

**Anggota** : Ir. Priyatno Bambang Hernowo, S.T., M.M., MPU, IPU, ASEAN Eng.

Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si., Ph.D., ASEAN Eng.

Ir. Ferry Firmawan, S.T., M.T., Ph.D., IPU

Ir. Anisa Ananta Citra, S.T., MBA

Dr. Ir. Fachrul Kurniawan, M.MT., IPU

Ir. Hadi Purwanto, S.Si., MMSI, MMB, IPP

## 2. LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN

Pemerintah daerah perlu memperhatikan penerapan praktik keinsinyuran dalam pembangunan di daerahnya karena praktik ini menjamin bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan secara ilmiah, efisien, aman, dan berkelanjutan. Melalui penerapan praktik keinsinyuran, pemerintah daerah dapat memperoleh berbagai dampak:

1. Menjamin kualitas dan keamanan infrastruktur dan teknologi;
2. Mendukung efisiensi anggaran dan akuntabilitas;
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
4. Memenuhi regulasi, terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran; dan
5. Meningkatkan daya saing daerah.

## 2. LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN

Untuk mendukung pemerintah daerah melakukan pembangunan daerah selaras dengan penerapan praktik keinsinyuran, Persatuan Insinyur Indonesia (Pll) menginisiasi Indeks Keinsinyuran Pll, sebuah indeks yang dirancang untuk mengukur kinerja keinsinyuran pemerintah daerah dan memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki kinerja keinsinyuran yang baik. Dalam melaksanakan inisiatif ini, Pll membentuk Tim Pelaksana yang bersifat ad hoc di lingkungan Pengurus Pusat Pll.



## 2. LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN

### Definisi

Indeks Keinsinyuran PII adalah indeks yang mengukur tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam pembinaan dan penerapan praktik keinsinyuran dalam pembangunan daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.



## 2. LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN

Oleh : Cahaya Dewi 

### Tujuan Indeks Keinsinyuran PII

1

Mengetahui sejauh mana penerapan praktik keinsinyuran dalam pembangunan di berbagai daerah.

2

Membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

3

Meningkatkan kesadaran pemerintah daerah mengenai kewajiban penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

4

Memberikan pengakuan dan meningkatkan reputasi secara nasional bagi penerima Penghargaan Keinsinyuran PII sebagai instansi yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran beserta peraturan perundangan yang berlaku.

5

Mendorong kolaborasi PII dan pemerintah daerah untuk mengakselerasi pembangunan daerah dengan pendekatan teknokratik yang berbasis pada keahlian dan solusi berbasis teknologi.

## 2. LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN

Indeks Keinsinyuran PII diukur berdasarkan sejumlah ASPEK yang menunjukkan penerapan praktik Keinsinyuran dalam pembangunan suatu daerah.

No.	Aspek	Deskripsi	Landasan UU Keinsinyuran
1	Kelembagaan dan Kebijakan.	Mengukur kesesuaian kebijakan teknis daerah dengan standar Keinsinyuran.	Pasal 8, 10, 16, 50.
2	Sumber Daya Manusia.	Mengukur jumlah dan komposisi Insinyur yang memenuhi kepatuhan berdasarkan ketentuan UU Keinsinyuran.	Pasal 9 - 12.
3	Proyek Keteknikan.	Mengukur kepatuhan penerapan ketentuan Keinsinyuran dalam proyek keteknikan untuk pembangunan di daerah.	Pasal 4, 6, 16, 50.
4	Dampak dan Keberlanjutan.	Mengukur dampak hasil kerja Keinsinyuran pada peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan keberlanjutan lingkungan melalui perolehan prestasi daerah.	Pasal 4 - 6, 10.

## **2. LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN**

**Metodologi Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII**

**Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII  
didesain berdasarkan beberapa hal  
sebagai berikut:**

- 1. Indikator**
- 2. Aspek**
- 3. Parameter**
- 4. Kriteria**
- 5. Bobot**
- 6. Rasio Jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN dengan Jumlah Tenaga Ahli  
ASN (Teknik dan Non-Teknik)**
- 7. Predikat Indeks Keinsinyuran**



## 2. LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN

Metodologi Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII

### I. Indikator

Indikator yang digunakan pada Indeks Keinsinyuran adalah **Dinas-Dinas dan Badan-Badan (OPD)** yang ada di Pemerintah Daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota.

### II. Aspek

Ada 4 Aspek seperti pada slide sebelumnya yang digunakan pada Indeks Keinsinyuran.

### III. Parameter

Ada 9 Parameter untuk 4 Aspek Pengukuran Indeks Keinsinyuran.

## 2. LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN

### Metodologi Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII

Parameter	
1	Apakah ada kebijakan tertulis dari Instansi Pemda mengikuti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran?
2	Apakah Instansi memiliki ASN yang sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains yang telah berkontribusi pada profesi Insinyur pada kegiatan pembangunan bidang keinsinyuran atau terlibat dalam penyusunan kebijakan?
3	Apakah Instansi memberikan kesempatan bagi ASN yang sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains untuk menjadi pengurus atau mengikuti kegiatan PII?

## 2. LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN

### Metodologi Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII

Parameter	
4	Apakah Instansi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ASN yang sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains atas kepatuhannya pada Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014?
5	Apakah Instansi memberikan fasilitas/peluang bagi ASN yang sarjana teknik atau sarjana terapan bidang teknik atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana sains untuk mengembangkan pengetahuannya melalui training, conference, pembelajaran lainnya?
6	Apakah ada kebijakan tertulis PEMDA berupa NSPK (misal dokumen tender) yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan berbasis keinsinyuran dan menyebutkan persyaratan personil sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran?

## 2. LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN

### Metodologi Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII

Parameter	
7	Apakah proyek-proyek pembangunan PEMDA dirancang dan diawasi oleh Insinyur yang memiliki STRI?
8	Apakah proyek-proyek yang dilaksanakan PEMDA telah mengadopsi teknologi termutakhir (misal: sistem irigasi pintar, e-planning infrastruktur, dan lain-lainnya)?
9	Apakah PEMDA dan/atau Instansi pernah menerima penghargaan pembangunan ( misal: Adipura, SPBE, Keberlanjutan, dan lain-lainnya)?

## 2. LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN

Metodologi Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII

### IV. Kriteria

Tingkat		Kriteria
1	Pemula	Tenaga Ahli yang digunakan adalah lulusan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik, atau sarjana pendidikan bidang teknik atau sarjana bidang sains yang disetarakan.
2	Pendidikan Profesi	Tenaga Ahli yang digunakan sedang mengikuti pendidikan Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI).
3	Profesi	Tenaga Ahli yang digunakan sudah memperoleh gelar Insinyur (Ir.).
4	Proses FAIP	Tenaga Ahli yang digunakan sedang dalam proses uji kompetensi Formulir Aplikasi Insinyur Profesional (FAIP).
5	Profesional dan Terdaftar (Optimal)	Tenaga Ahli yang digunakan sudah memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur Profesional (SKIP) dan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI).

## 2. **LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN**

Metodologi Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII

### **V. Bobot**

Bobot pada masing-masing Dinas dan Badan (OPD) akan ditentukan berdasarkan hasil survei lapangan, yang ditentukan dari komposisi Tenaga Ahli ASN di Dinas-Dinas dan Badan-Badan (OPD).

### **VI. Rasio Jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN terhadap Jumlah Total Tenaga Ahli ASN (Teknik dan Non-Teknik) di Dinas dan Badan.**

Rasio jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN di setiap Dinas dan Badan perlu dihitung dengan membandingkan jumlah Tenaga Ahli Teknik ASN dengan total jumlah Tenaga Ahli ASN (Teknik dan Non-Teknik).

Definisi ASN sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara: Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## 2. LATAR BELAKANG DAN KONSEP INDEKS KEINSINYURAN

Metodologi Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII

### VII. Predikat Indeks Keinsinyuran

No.	Angka Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3	2,6 - <3,5	Baik
4	1,8 - <2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

Referensi: Ketentuan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) pada Pedoman Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2024.

### 3. HASIL DAN MANFAAT

#### Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII



Hasil pengukuran Indeks Keinsinyuran PII akan diumumkan melalui **Laporan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia** dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan semua pemerintah daerah peserta.

### 3. **HASIL DAN MANFAAT**

#### Penghargaan Keinsinyuran PII

Dari hasil pengukuran Indeks Keinsinyuran PII setiap tahun, akan diberikan penghargaan kepada sejumlah daerah berupa Penghargaan Keinsinyuran PII.

PENGHARGAAN KEINSINYURAN PII adalah penghargaan tahunan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks tertinggi yang dibagi menjadi beberapa kategori pemerintah daerah.

**Penghargaan Keinsinyuran PII pertama akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan capaian Indeks Keinsinyuran terbaik pada tanggal 10 Agustus 2026 yang bertepatan dengan HAKTEKNAS 2026.**

### 3. HASIL DAN MANFAAT

#### Manfaat Penghargaan Keinsinyuran PII

1. Menjamin kualitas dan keamanan infrastruktur dan teknologi;
2. Mendukung efisiensi anggaran dan keamanan akuntabilitas;
3. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
4. Memenuhi regulasi, terutama Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran; dan
5. Meningkatkan daya saing daerah.



# 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

## Metode Pelaksanaan Tugas Tim Ad Hoc

Menyiapkan Pedoman Kerja Persatuan Insinyur Indonesia Indeks Keinsinyuran dan Penghargaan Keinsinyuran PII Kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia.

Terdiri dari 8 Bab dan 20 Pasal, diantaranya:

<b>Ketentuan Umum</b>	<b>Organisasi Pelaksanaan</b>
<b>Tujuan, Ruang Lingkup, dan Acuan</b>	<b>Pembiayaan</b>
<b>Indeks Keinsinyuran PII</b>	<b>Sistem Manajemen Mutu</b>
<b>Penghargaan Keinsinyuran PII</b>	<b>Penutup + Lampiran-Lampiran</b>

# 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

## Metode Pelaksanaan Tugas Tim Ad Hoc

Dalam rangka implementasi Indeks Keinsinyuran, akan dilakukan 2 Tahap SOSIALISASI, yaitu:

- 1) Sosialisasi kepada PW dan PC PII, serta untuk Calon Anggota Dewan Asesor di seluruh Indonesia.
- 2) Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia melalui webinar atau pertemuan langsung, yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, serta APPSI, APKASI, dan APEKSI.

Pelaksanaan Sosialisasi 1) dan Bimbingan Teknis khusus bagi Calon Asesor dilaksanakan pada tanggal:

- ☐ Koridor I (Sumatera dan Kalimantan): **2x: Okt - Des 2025**

## 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

### Metode Pelaksanaan Tugas Tim Ad Hoc

- Koridor II (Jawa, Bali, NTB, NTT) : **2x: Okt - Des 2025**
- Koridor III (Sulawesi, Maluku, Papua): **2x: Nov - Des 2025**
- Semua Koridor: 7 & 8 Feb 2026 dan 14 & 15 Feb 2026.

Pelaksanaan Sosialisasi 2), diperkirakan dapat dilaksanakan pada kurun waktu: **TBA**

Implementasi pengukuran mandiri Indeks Keinsinyuran PII diperkirakan pada tanggal **TBA**

**Pengumuman hasil pengukuran Indeks Keinsinyuran** dan **Penyerahan Penghargaan Keinsinyuran PII pertama** diperkirakan pada tanggal **31 Juli 2026** dan **10 Agustus 2026**.

# 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

## Organisasi Pelaksanaan

Oren, Cahaya Dewi



### ① Panitia Pengarah

- a. **Ketua Umum.**
- b. **Wakil Ketua Umum.**
- c. **Sekretaris Jenderal.**
- d. **Anggota.**

### ② Panitia Pelaksana

- a. Ketua ex-officio Ketua Tim Ad Hoc.
- b. Wakil Ketua ex-officio Ketua Badan Pelaksana Komunikasi dan Penghargaan PII Pusat.
- c. Sekretaris.
- d. Bendahara.
- e. Anggota.

# 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

## Organisasi Pelaksanaan

Oren, Cahaya Dewi



### ① Panitia Pengarah

Anggota Panitia Pengarah terdiri dari satu orang atau lebih yang ditentukan oleh Pengurus Pusat PII atau Badan Pelaksana Komunikasi dan Penghargaan PII

### ② Panitia Pelaksana

Anggota Panitia Pelaksana terdiri dari satu orang atau lebih yang ditentukan oleh Pengurus Pusat PII atau Badan Pelaksana Komunikasi dan Penghargaan PII, serta dilengkapi dengan seluruh **Ketua Pengurus Wilayah PII di seluruh Indonesia.**

# 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

## Organisasi Pelaksanaan

Oren, Cahaya Dewi



### ① Panitia Pengarah

**Tugas Panitia Pengarah adalah merumuskan tema pokok Penghargaan Keinsinyuran PII dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan besar yang tengah dihadapi dalam praktik Keinsinyuran yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah.**

# 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

## Organisasi Pelaksanaan

Oleh: Cahaya Dewi



### ② Panitia Pelaksana

**Tugas Panitia Pelaksana adalah:**

- a. Menjalankan tugas penyelenggaraan Penghargaan PII sesuai dengan Pedoman Kerja dan yang digariskan oleh Panitia Pengarah.**
- b. Menyusun rencana kerja pengukuran Indeks Keinsinyuran dan penyerahan Penghargaan Keinsinyuran PII sesuai dengan target yang ditentukan oleh Panitia Pengarah.**
- c. Melakukan verifikasi dan validasi anggota Dewan Asesor yang diusulkan oleh Ketua Pengurus Wilayah PII dan Ketua Pengurus Cabang PII kepada Panitia Pelaksana untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan dari Ketua Umum PII.**

# 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

## Organisasi Pelaksanaan

Oleh: Cahaya Dewi



### ② Panitia Pelaksana

**Tugas Panitia Pelaksana adalah:**

- d. Memberi pengarahan kepada anggota Dewan Asesor.**
- e. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh anggota Dewan Asesor.**
- f. Membuat laporan berkala bilamana diperlukan dan laporan akhir penyelenggaraan Indeks Keinsinyuran dan Penghargaan Keinsinyuran PII untuk dilaporkan kepada Pengurus Pusat.**
- g. Mengajukan usul jenis penghargaan baru kepada Pengurus Pusat PII untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan.**



## 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

### Organisasi Pelaksanaan

#### ③ Dewan Asesor

Anggota Dewan Asesor terdiri dari Anggota Biasa PII dengan mempertimbangkan pengalaman, tingkat pengetahuan, dan tingkat kematangan sebagai perorangan terhadap keprofesian bidang Keinsinyuran, memahami ketentuan terkait Keinsinyuran, dan telah memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur minimal dengan kualifikasi Insinyur Profesional Madya.



## 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

### Organisasi Pelaksanaan

#### ③ Dewan Asesor

**Anggota Dewan Asesor sebagaimana dimaksud di atas; dipilih oleh Ketua Pengurus Wilayah PII untuk asesmen pengukuran Indeks Keinsinyuran Pemerintah Provinsi dan untuk Pemerintah Daerah yang belum memiliki Pengurus Cabang PII, oleh Ketua Pengurus Cabang PII untuk asesmen pengukuran Indeks Keinsinyuran Pemerintah Kabupaten atau Kota Pengurus Wilayah, dan didukung oleh seluruh Ketua Badan Keahlian PII.**



## 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

### Organisasi Pelaksanaan

#### ③ Dewan Asesor

Dalam memilih Anggota Dewan Asesor, Ketua Pengurus Wilayah PII dan Ketua Pengurus Cabang PII dapat mengutamakan bagi Anggota Majelis Uji Kompetensi (MUK) di daerahnya dengan **minimal 3 orang** calon Anggota Dewan Asesor.



## 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

### Organisasi Pelaksanaan

#### ③ Dewan Asesor

Baik calon Anggota dari unsur MUK ataupun yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, harus mengikuti pelatihan calon Asesor Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII yang diselenggarakan oleh Tim Ad Hoc atau Badan Pelaksana Komunikasi dan Penghargaan PII Pusat.



## 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

### Organisasi Pelaksanaan

#### ③ Dewan Asesor

**Panitia Pelaksana maupun Anggota PII sebagai ASN di Pemerintah Daerah tidak dibenarkan menjabat sebagai Anggota Dewan Asesor untuk Pemerintah Daerahnya.**

***ASN di Pemerintah Daerah “A” diperkenankan menjadi Anggota Dewan Asesor untuk Pemerintah Daerah lainnya.***

# 4. METODE DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

## Organisasi Pelaksanaan

Oleh: Cahaya Dewi



### ③ Dewan Asesor

Tugas utama Dewan Asesor adalah:

- a. Menyesuaikan dengan jadwal kerja yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana.
- b. Memilih Ketua di antara mereka.
- c. Melakukan asesmen terhadap data dan dokumenter yang terdapat pada **Microsite** yang diterima dari masing-masing Pemerintah Daerah.
- d. Membuat laporan hasil akhir penilaian dan/atau verifikasi kepada Panitia Pelaksana, termasuk penjelasan mengenai alasan dan pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan urutan hasil pengukuran Indeks Keinsinyuran Tertinggi ke-1, ke-2, ke-3. dan/atau seterusnya di setiap klasifikasi dan kategori penghargaan.

## 5. PERAN PII

### Peran

PII berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan keinsinyuran di Indonesia melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, sertifikasi, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan penelitian.

### Upaya

PII juga berupaya meningkatkan profesionalisme Insinyur dan kualitas keinsinyuran melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.





## 6. KESIMPULAN

### Kesimpulan

Indeks Keinsinyuran dan Penghargaan Keinsinyuran PII dapat menjadi alat untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pembangunan daerah.

### Harapan

Kami berharap bahwa presentasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Keinsinyuran dalam pembangunan nasional.



**MOHON SARAN DAN DUKUNGAN**

**BAPAK/IBU CALON**

**ANGGOTA DEWAN ASESOR PII**

**DI SELURUH INDONESIA**



**Terima kasih atas kesediaan**  
**Bapak/Ibu Calon**  
**Anggota Dewan Asesor PII**  
**untuk menghadiri Sosialisasi**  
**Pengukuran Indeks Keinsinyuran PII**



# **LANJUT KE BAGIAN KEDUA saya persilahkan kepada:**



**Bapak Ir. M. Yanuar J. Purwanto, Ph.D., IPU, ASEAN Eng.**

